



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR:180.182/236/KEP/22/2025

TENTANG

PANITIA SELEKSI PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH
TAHUN 2025

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Bupati Magelang Nomor 69 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Terbuka dan Kompetitif, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 404);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1377);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1332);
9. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 845);
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2024 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan Metode *Computer Assisted Test (CAT)* Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 479);
11. Peraturan Bupati Magelang Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Terbuka Dan Kompetitif (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 70);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara Daerah Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati.
- KEDUA : Panitia Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. menyusun jadwal pelaksanaan seleksi pengadaan ASN;
 - b. mengumumkan jenis jabatan yang lowong, jumlah ASN yang dibutuhkan, dan persyaratan pelamaran;
 - c. melakukan seleksi administrasi terhadap berkas lamaran dan dokumen persyaratan lainnya sebagaimana tercantum dalam pengumuman;
 - d. menyiapkan sarana pelaksanaan seleksi kompetensi;
 - e. melaksanakan seleksi kompetensi bersama-sama dengan panitia seleksi nasional pengadaan ASN;
 - f. mengumumkan hasil seleksi administrasi, hasil seleksi kompetensi;
 - g. mengusulkan hasil seleksi tes kompetensi bidang kepada panitia seleksi nasional;

- h. menetapkan kelulusan hasil seleksi Calon Aparatur Sipil Negara dari pelamar umum;
- i. menyusun usulan pengangkatan menjadi Calon Aparatur Sipil Negara;
- j. melaksanakan pengangkatan menjadi Calon Aparatur Sipil Negara;
- k. melaksanakan pengangkatan menjadi Aparatur Sipil Negara; dan
- l. melaporkan seluruh penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kepada Bupati.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi Pengadaan Aparatur Sipil Negara Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 18 Juni 2025

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIS DISDUKCAPIL,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 196812281994031006

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR : 180.182/236/KEP/22/2025
 TENTANG
 PANITIA SELEKSI PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH
 TAHUN 2025

PANITIA SELEKSI PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA DAERAH TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	GRENGSENG PAMUJI	Bupati	Pengarah I	Apabila terjadi mutasi jabatan maka penggantinya secara langsung menggantikan kedudukan dalam Panitia dimaksud.
2	H. SAHID, S.H.	Wakil Bupati	Pengarah II	
3	Drs. ADI WARYANTO	Sekretaris Daerah	Ketua	
4	NANDA CAHYADI PRIBADI, AP., M.Si.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Ketua I	
5	BAMBANG HERMANTO, S.STP.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Wakil Ketua II	
6	Drs. ASFURI, M. Si.	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua III	
7	AZIS AMIN MUJAHIDIN, S.Pd.,M.Pd	Plt. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Sekretaris	
8	AZIS AMIN MUJAHIDIN, S.Pd., M.Pd.	Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Sosial dan Sumber Daya Manusia	Anggota	
9	IWAN SUTIARSO, S.Sos. M.Si.	Inspektur	Anggota	
10	Dra. SITI ZUMAROH, M.M.	Kepala Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
11	M. TAUFIQ HIDAYAT YAHYA, S. STP., M.Si.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Anggota	

1	2	3	4	5
12	SLAMET ACHMAD HUSEN, S.E.,	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota	
13	BUDI DARYANTO, S. STP, M.Si.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	
14	LABBAIKA NUGROHO, S.STP., M.M.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran	Anggota	
15	dr. SUNARYO	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota	
16	GUNAWAN ANDI PRIHANANTA, S.Sos., M.M.	Kepala Bagian Umum	Anggota	
17	DARYOKO UMAR SINGGIH, S.I.P., M.M.	Kepala Bagian Organisasi	Anggota	
18	RATNA YULIANTY, S.H., M.H.	Kepala Bagian Hukum	Anggota	
19	ZANUAR EFENDI, S.I.P.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Anggota	
	TIM SELEKSI ADMINISTRASI			
1	AZIS AMIN MUJAHIDIN, S.Pd.,M.Pd.	Plt. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Ketua	Apabila terjadi mutasi jabatan maka penggantinya secara langsung menggantikan kedudukan dalam Tim dimaksud.
2	SUNGEDI, S.H., M.M.	Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	Wakil Ketua	
3	AGUNG SATRIA UTAMA, S.Kom., M.Eng.	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian pada BKPPD	Sekretaris	
4	HERLINA NURROHMAH, S.STP., M.Si.	Kepala Bidang Pengembangan Karier pada BKPPD	Anggota	
5	AGUS TRIWIJOKO, S.Sos., M.M.	Kepala Bidang Kinerja dan Pembinaan Pegawai pada BKPPD	Anggota	
6	IRMA NORMAHAYATI, S.E.	Kepala Bidang Pengembangan Sumber daya Manusia pada BKPPD	Anggota	

1	2	3	4	5
7	MUHAMMAD SUBIYANTARA., M.Pd.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan pada Disdikbud	Anggota	
8	dr. YUNIAR, M.P.H.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan	Anggota	
9	SITI MUNAWAROH, S.Sos.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada BKPPD	Anggota	
10	NUGRAHENI, S.Sos., M.A.P.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada BKPPD	Anggota	
11	ANASTASIA DANTI NATALIA, S.Psi.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada BKPPD	Anggota	
12	ANITA TIAR KUSUMA W., S.H.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada BKPPD	Anggota	
13	RADEN RARA TANTI FARIDA KUSUMANING DEWI, S.Sos., M.M.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada BKPPD	Anggota	
14	SITO LASMI NUGRAHENI, S.I.P.	Kepala Sub Bagian Program pada BKPPD	Anggota	
15	HERMANTO, S.E., M.M.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada BKPPD	Anggota	
16	WAWAN DIYANTANA, S.ST., M.K.M.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kesehatan	Anggota	
17	NUR FAUZIAH, S.K.M.	Administrator Kesehatan Ahli Muda	Anggota	
18	DWI RATNAWATI, S.Pd., M.M.	Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pembinaan GTK pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota	
19	INDAR, M.Pd.	Kepala Seksi Pengembangan Karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota	
20	FETY IKRIMA RAHMAWATI, S.Tr.I.P	Penelaah Teknis Kebijakan pada BKPPD	Petugas Teknis	

1	2	3	4	5
21	ADE APRIANSA HABIB BULLOH, A.Md.	Pranata Komputer Terampil pada BKPPD	Petugas Teknis	
22	EGY SATRIA HANTORO, A.Md.Kom.	Pranata Komputer Terampil pada BKPPD	Petugas Teknis	
23	HERI GUNAWAN, S.A.P.	Arsiparis Mahir pada BKPPD	Petugas Teknis	
24	HAYU VERIKA INDRA K, S.Akun.	Penelaah Teknis Kebijakan pada BKPPD	Petugas Teknis	
25	YUTININGSIH, A.Md.	Pranata Komputer Mahir pada BKPPD	Petugas Teknis	
26	NUSA TIRTA SURYA, S.H.	Penelaah Teknis Kebijakan pada BKPPD	Petugas Teknis	
27	EDY MARDIYANTO, A.Md.	Pranata Komputer Mahir pada BKPPD	Petugas Teknis	
28	BOBY ATMAKA PRIMA, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama pada BKPPD	Petugas Teknis	
29	ASTRI PRIHANTINI, A.Md.	Pranata Komputer Mahir pada BKPPD	Petugas Teknis	
30	M. HERI SETYAWAN, S.A.P.	Penelaah Teknis Kebijakan pada BKPPD	Petugas Teknis	
31	RIDHO BAGUS DARMAWAN, S.Tr.IP	Penelaah Teknis Kebijakan pada BKPPD	Petugas Teknis	
32	ALDYHUSNI ISTIJAB ADITYAWAN, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama pada BKPPD	Petugas Teknis	
33	MUHAMMAD AGAM REZANI, A.Md.	Pranata Komputer Terampil pada BKPPD	Petugas Administrasi	
34	M. CHOLID NUR ROCHMAN, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama pada BKPPD	Petugas Administrasi	
35	KURNIA NOVI WIJAYANTI, A.Md.	Pranata Komputer Mahir pada BKPPD	Petugas Administrasi	
36	QINDI LARASATI SUTOPO, S.H.	Penelaah Teknis Kebijakan pada BKPPD	Petugas Administrasi	
37	AULIA RAMADHANI, S.Tr.IP.	Penelaah Teknis Kebijakan pada BKPPD	Petugas Administrasi	
38	YESSY ANGGITA SARI, S.Sos	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada BKPPD	Petugas Administrasi	

1	2	3	4	5
39	AMIFA NINDYASARI, S.E.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama pada BKPPD	Petugas Administrasi	
40	DINA HERNI ARYANI, S.E.	Arsiparis Mahir pada BKPPD	Petugas Administrasi	
41	TRİYANI SETYOWATI	Pengadministrasian Perkantoran pada BKPPD	Petugas Administrasi	
42	SUYANTI	Pengadministrasian Perkantoran pada BKPPD	Petugas Administrasi	
43	AWET AGUS ARI WIBOWO	Pengolah Data dan Informasi pada BKPPD	Petugas Administrasi	

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIS DISDUKCAPIL,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.

Pembina Tingkat I

NIP. 196812281994031006